

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Umum Tentang Aktualisasi Pendidikan Politik

1. Pengertian Aktualisasi Pendidikan Politik

Aktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal mengaktualkan atau pengaktualan. Mengaktualkan atau pengaktualan merupakan suatu bentuk yang menjadikannya aktual atau dengan kata lain bisa disebut telah terjadi. Sedangkan Pendidikan Politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *Political Socialization*, jika diartikan secara harfiah ke dalam Bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Sosialisasi politik memang merupakan bagian dari pendidikan politik secara sempit, karena dengan sosialisasi politik masyarakat akan terbangun sikap politik serta memiliki pengetahuan politik yang luas (Sunatra, 2016, hlm. 41-42).

Kartini Kartono (1989, hlm.68) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menjunjung pemberlakuan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

Berdasarkan pendapat di atas pendidikan politik memiliki tugas untuk menyadarkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pendidikan politik menumbuhkan kesadaran politik pada setiap orang yang mempelajarinya kemudian setelah sadar mereka akan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara berpartisipasi dalam segala kegiatan politik pemaparan ini sejalan dengan pendapat dari Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm.71) bahwa :

“Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara mesti dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Dan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut pendidikan politik memiliki kedudukan yang sangat penting. Pendidikan politik (political education) sebagai salah satu konsep dalam ilmu politik, berkenaan dengan

bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan agar warga negara atau masyarakat mengerti dan memahami politik”.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan baik karena manfaat pendidikan politik sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm.72) bahwa, “Pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya”. Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali akan berkontribusi positif bagi bangsa.

Pendidikan politik jelas berbeda dengan indoktrinasi politik, yang merupakan belajar politik yang bersifat monolog bukan dialog, lebih mengutamakan pembangkitan emosi, dan lebih merupakan pengarahan politik untuk dukungan kekuatan politik (mobilisasi politik) dari pada meningkatkan partisipasi politik. Indoktrinasi politik ini pada umumnya dilakukan oleh rezim otoriter atau totaliter untuk mempertahankan status, partai politik juga pada umumnya lebih banyak menggunakan indoktrinasi politik dari pada pendidikan politik (Cholisin, 2000, hlm. 6).

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartini K, 2009, hlm. 64). Pendidikan politik merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya (Kartini K, 2009, hlm. 65).

Pendidikan politik dirujuk sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam. Misalnya proses rekrutmen elit politik yang didasarkan pada basis modal ekonomi dan

tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu; politik yang tidak berdasarkan pada pemihakan kepada rakyat, tercerabutnya basis etika politik. Pendidikan politik diharapkan mengoreksi dan membangun kesadaran terhadap ancaman yang tengah berlangsung atas proses distortif dalam sistem politik yang sedang berjalan. Perilaku politik masyarakat setidaknya dapat dirunut dari level-level psikologis yang terjadi dalam proses dan selama berlangsungnya pendidikan.

Dapat diartikan bahwa pada dasarnya pendidikan politik memiliki tujuan mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan.

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan politik maupun politik pendidikan itu sendiri, maka kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis. (Affandi, 1996, hlm. 25) menyatakan pendidikan politik "*political education*" sering kali menggunakan berbagai peristilahan lain seperti "*political socialization*" dan "*citizenship training*". (Rusadi Kantaprawira, 1988, hlm. 54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

(Affandi, 1996, hlm. 27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara (Sumantri, 2003, hlm. 3). Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

(Sunatra, 2016, hlm. 48) menyatakan pula upaya pendidikan politik dalam hubungannya dengan proses pendidikan pada umumnya adalah mencoba memberikan pengalaman politik baru dengan sedikit demi sedikit meninggalkan *status quo* walaupun pada prinsipnya proses pendidikan politik adalah indoktrinasi politik. Pendidikan politik yang dikembangkan menerapkan prinsip demokrasi sebagai landasan pola pikirnya, setiap orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik untuk membangun masyarakat yang mendambakan kehidupan sejahtera.

Warga negara berhak mendapatkan pendidikan politik yang diselenggarakan negara dan seseorang bebas dididik. Pendidikan politik sebenarnya secara alamiah telah berjalan dan terus berkembang melalui berbagai interaksi sosial dalam masyarakat yang dikenal sebagai transformasi nilai. Melalui proses transformasi tersebut seseorang dapat menilai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, layak atau tidak layak, pantas atau tidak, benar atau salah itulah yang disebut *moral judgement*. Namun demikian, walaupun proses penghayatan nilai berlangsung secara alamiah, akan lebih berhasil apabila dilakukan secara sadar dan berencana melalui proses pendidikan.

Pendidikan politik di Indonesia sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan melalui berbagai kegiatan organisasi dan gerakan politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan oleh generasi muda

Indonesia untuk memperoleh hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajahan. Sejak tahun 1908, partai-partai politik dan organisasi massa lainnya tumbuh dengan pesatnya. Organisasi pertama disebut-sebut organisasi modern di Indonesia berdiri pada tahun 1908 yaitu Boedi Utomo. Mula-mula lapangan geraknya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang kemudian berkembang ke ranah politik. Timbulnya angkatan 1908 ini, dalam konteks pendidikan politik memiliki ciri khas, yaitu merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi (Sunatra, 2016, hlm 49).

Berdasarkan pemaparan pendidikan politik diatas secara eksplisit dapat dikatakan bahwa pendidikan politik adalah proses penurunan atau pewarisan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi negara yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan berlangsung secara berkelanjutan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*nation character building*).

Dapat disimpulkan pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik di masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan, dan aneka ragam pikiran, tindakan, dan perilaku manusia. Pendidikan politik merupakan upaya mengenalkan suatu sistem politik pada individu dan menentukan reaksi terhadap gejala-gejala politik dalam sistem tersebut. Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat ditunjukkan secara bergantian.

Pendidikan politik harus digenjut sedini mungkin kepada setiap generasi penerus bangsa untuk memiliki pemahaman secara holistik terkait fenomena politik yang terjadi. Untuk mencapai semua itu perlu juga pendidikan politik kepada guru, khususnya guru PPKn yang merupakan bidang dalam membahas politik kepada generasi penerus bangsa supaya memiliki pandangan cerah dan jernih dalam mengartikan sebuah politik. Secara keseharian guru berinteraksi dan memberikan materi pendidikan politik kepada peserta didik, supaya tidak salam dalam mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didik guru PPKn pun

harus memiliki pengetahuan yang amat luas supaya tidak teledor dalam memberikan materi terkait pendidikan politik. Jika guru cerdas maka akan melahirkan pula peserta didik yang cerdas, memang negara ini harus dibangun konstruksi berpikirnya untuk menajdi orang cerdas bukan orang yang hanya mengikuti saja.

2. Kedudukan Pendidikan Politik

Menurut Sunatra (2016, hlm. 57) Pendidikan politik memiliki tiga makna, yaitu pendidikan politik sebagai sosialisasi politik, pendidikan politik sebagai politik etis, dan pendidikan politik sebagai ilmu. Pendidikan politik sebagai sosialisasi politik sama artinya dengan *geschicte* dalam bahasa Jerman yang berasal dari kata *geschechte* yang berarti telah terjadi atau peristiwa politik yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sama artinya dengan *res gestae* dalam Bahasa latin, bermakna memasyarakatkan hal-hal atau nilai yang telah terjadi dalam politik praktis kenegaraan dan pemerintahan. Indonesia memiliki sejarah politik yang dapat dipetik nilainya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara mulai prasejarah, zaman colonial, era revolusi kemerdekaan, orde lama, orde baru, sampai sekarang era reformasi yang perlu diketahui dan dipahami warga negara.

Kajian pendidikan politik dalam pengertian sebagai sosialisasi politik memiliki sifat atau ciri-ciri einmalig dan unik. Einmalig berarti terjadi dan harus dijalankan untuk membina dan mengembangkan kewarganegaraan, sehingga warga negara mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab tentang hak dan kewajibanya. Setiap peristiwa politik hanya sekali terjadi dan tidak pernah terulang kembali, sedangkan nilainya hidup sepanjang masa. Sedangkan sifat unik menunjuk sebagai kegiatan yang khusus untuk mendidik warga negara agar memiliki kesadaran politik di samping memahami hak dan kewajibanya.

Pendidikan politik bersifat khusus dan merupakan bagian dari pembangunan politik. Pendidikan politik dalam pengertian ini adalah pendidikan politik dalam

pengertian objektif, artinya pendidikan politik harus sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan jati diri bangsa, sekaligus mempertahankan keutuhan negara, sistem politik dan mengembangkan budaya politik.

Kedudukan dan pelaksanaan pendidikan politik menurut Affandi (1996, hlm. 6) tidak hanya jasa menentukan efektifitas sebuah sistem politik karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga memberikan corak pada kehidupan bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya penerusan nilai-nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan.

Pendidikan politik memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Melalui pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut proses merupakan upaya proses pewarisan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda, generasi penerus bangsa yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Generasi muda pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan serta keterampilan politik sehingga menunjukkan pengetahuannya untuk berpolitik secara tanggung jawab.

Jika direnungkan, kita akan menyadari bahwa pendidikan politik sebagai kegiatan sosialisasi yang mendasarkan kepada peristiwa politik yang akan bersinar pada nilai kesejarahan (*historical values*), sedangkan pendidikan politik sebagai kegiatan sistematis untuk pembinaan dan pengembangan budaya politik merupakan rekonstruksi budaya politik untuk membangun sistem politik yang kokoh berdasarkan konstitusi dan ideologi nasional.

Pendidikan politik mengembangkan pengertian atau konsep sebagai ilmu. Namun demikian sampai sekarang para ahli ilmu politik belum ada kesepakatan mereka masih berdebat, apakah pendidikan politik masuk rumpun ilmu politik atau rumpun pendidikan. Hampir dipastikan tidak ada ahli yang menyebutkan

atau menjelaskan pendidikan politik masuk dalam rumpun ilmu pendidikan. Menanggapi hal ini perlu ada ketegasan kedudukan pendidikan politik, apakah masuk rumpun ilmu politik atau masuk rumpun ilmu pendidikan. Idealnya masuk ke rumpun ilmu pendidikan, sehingga dari segi objek dan metodologinya mengikuti model ilmu pendidikan. Mengapa demikian, karena pendidikan politik paling efektif dilakukan di lembaga pendidikan formal disbanding di masyarakat luas dan keluarga. Pendidikan politik bagi keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan pendidikan masyarakat, misalnya melalui pusat kegiatan bimbingan belajar.

Sebagai ilmu, pendidikan politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bersifat empirik. Artinya pendidikan politik mendasarkan diri pada pengamatan serta pengalaman manusia di kehidupan. Objek pendidikan politik adalah kegiatan manusia, kegiatan itu sendiri dapat diamati melalui bukti-bukti serta kesaksian dari perilaku politik
- b. Objek pendidikan politik adalah kebijakan publik, kegiatan politik pemerintahan dan kenegaraan, dan perilaku elit politik dan warga negara. sama dengan ilmu sosial yang memahami perilaku manusia dalam berbagai dimensi. Waktu yang dikaji dalam pendidikan politik adalah waktu subjektif, ialah waktu yang dialami dan dirasakan oleh manusia seperti halnya dalam ilmu sejarah.
- c. Pendidikan politik memiliki metode tersendiri. Metode yang ditunjukkan dalam pendidikan politik adalah metode deskriptif dengan pendekatan filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis. Dengan metode itulah akan dikaji keaslian sumber data, kebenaran informasi, serta bagaimana dilakukan interpretasi dan inferensi terhadap sumber data tersebut

Kedudukan pendidikan politik sebagai ilmu menjadi nyata ditempatkannya sebagai mata kuliah di perguruan tinggi dan secara formal di pendidikan dasar dan menengah dengan diberlakukannya *civic's education* berupa pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagian kecil dari

pendidikan politik keseluruhan, karena tidak hanya dalam pendidikan formal, juga harus diberlakukan dalam masyarakat secara massif. Disinilah perlunya merumuskan model pendidikan politik yang tepat bagi bangsa Indonesia baik dalam kerangka sosialisasi politik maupun politik etis dan sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan filsafat.

Sebagai ilmu, pendidikan politik berupaya menampilkan segala sesuatu yang secara faktual tentang peristiwa dan kebijakan politik, namun yang faktual itu dikomunikasikan dengan cara dan gaya yang menarik agar maknanya dapat memberikan pencerahan bagi bangsa dan negara, sehingga capaian warga negara yang melek politik (*political literacy*).

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik memilih fungsi dan tujuan yang krusial, dimana pendidikan politik akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses politik sehingga tercapainya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Berdasarkan beberapa uraian pendapat pakar sub bab sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama, yaitu (1) Fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata prilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab, dan (2) Fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin di terapkan.

Selain itu juga pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks negara kita, Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka pendidikan politik diarahkan agar warga negara memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi nasional yakni Pancasila sehingga mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara nalar dan bertanggung jawab. (Wuryan S dan Syaifullah, 2015, hlm. 71 dan 72) menyatakan pula bahwa tujuan dari pendidikan politik meliputi :

- a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan melalui keteladanan.
- b. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan konstitusi yang dilandasi dengan penuh kesadaran.
- c. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- d. Memiliki visi atau pandangan kedepan serta tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa.
- e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis secara sadar.
- f. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- h. Sadar akan pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.
- i. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atas dasar pola pikiran atau penalaran logis.

Pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Pendidikan politik yang dilaksanakan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali, terkoordinasi, akan berkontribusi positif bagi bangsa untuk pengembangan kesadaran politik atau melek politik (*political literacy*). Esensi pendidikan politik adalah mengenai bagaimana masyarakat mendapat sosialisasi

politik. Sosialisasi politik secara fungsi akan mendorong masyarakat mengerti akan peranan dalam sistem politik. Selain itu, melalui sosialisasi politik masyarakat memiliki orientasi terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Secara substansi fungsi pendidikan politik diharapkan mampu mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik dan mendorong tercapainya proses demokrasi.

4. Misi Pendidikan Politik

(Sunatra, 2016, hlm. 77) menyatakan misi pendidikan politik berkaitan dengan pembudayaan sistem politik yang dilandasi norma dasar yang terkandung dalam ideologi nasional dan konstitusi negara dengan mendayagunakan kelembagaan dan proses pendidikan secara sistematis dan terintegrasi. Secara normative dan praktis proses pembudayaan dikembangkan berdasarkan komponen-komponen yang berlaku dan tatanan nilai sosial budaya dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*).

Pandangan hidup yang dimaksud adalah Pancasila ideologi dan dasar negara yang harus mewarnai seluruh kehidupan politik. Tentu hal ini berkaitan dengan sikap pendiri negara, terutamanya yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan, musyawarah mufakat dalam menetapkan dan mengesahkan filsafat hidup ini sebagai dasar negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ketetapan demikian diakui sebagai hukum dasar negara, kaidah negara yang fundamental dan jiwa konstitusi negara. Nilai fundamental ini sebagai asas moral sistem kenegaraan yang memancarkan identitas dan integritas nasional, yaitu memiliki sifat memaksa dan mengikat seluruh warga negara Indonesia termasuk lembaga negara dan penyelenggara negara.

Pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan jiwa dan kepribadian warga negara atau individu-individu untuk mendapatkan informasi, wawasan serta memahami sistem politik yang berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi di

sekitarnya. Jiwa dan kepribadian tersebut ditandai oleh empat indikator, yaitu rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bersatu (*sense of unity*), rasa solidaritas (*sense of solidarity*), dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*). Warga negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah dari masalah-masalah politik yang ada di sekitarnya. antara lain melalui partai politik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan menjadi ujung tombak dalam pencapaian warga negara yang melek politik atau pendewasaan individu dalam berpolitik. Pendidikan politik memberi arti untuk menciptakan warga negara menjadi dewasa secara politik dan mampu mendudukkan hak politiknya.

Di era demokratisasi, pendidikan politik memiliki misi mengembangkan prinsip demokrasi pada semua lini kehidupan sebagai landasan pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang dibuat. Hal ini senada dengan Haines (Brownhill, 1989, hlm. 4), upaya pendidikan politik bertujuan untuk *“Free men have to decide, to choose, to elect representatives, support of under mine policies, advocate, persuade, guide, teach, as well as manage, their own affairs as well as they are able”*.

Negara menjamin dan menghargai hak setiap warga negara untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini warga negara bertanggung jawab menganalisa dan memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung secara mandiri. Dapat disimpulkan misi dari pendidikan politik yakni menghidupkan suatu proses demokrasi yang berlandaskan kebebasan dan hal tersebut dijadikan sebagai prinsip politik di Indonesia yang bebas, akan tetapi mendasarkan pada koridor regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Misi pendidikan politik sendiri sebenarnya sudah benar terkadang misi tersebut sering disalahgunakan oleh

orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, maka dari itu setiap warga negara apalagi seorang guru PPKn harus pandai menganalisis hal tersebut.

B. Konsep Literasi Politik (*Political Literacy*)

1. Pengertian Literasi Politik (*Political Literacy*)

Menurut Denver dan Hands (1990) dalam Karim dkk (2015, hlm. 5), Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman ini oleh Cassel dan Lo (1997) sebagaimana dikutip Karim dkk (2015, hlm. 5) disebut sebagai *political expertise* dan *political awareness*, yang intinya merujuk pada maksud sejauhmana seorang individu warga negara memberi perhatian dan memahami isu-isu politik.

Menurut pendapat Bernard Crick (2000, hlm. 61) dalam tulisannya *Essays on Citizenship*, definisi dasar tentang literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa. Merupakan memahami isu seputar politik, apa keyakinan utama para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri anda dan saya. Singkatnya literasi politik adalah senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menjelaskan literasi politik lebih luas dari hanya sekadar pengetahuan politik, melainkan cara” membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik” dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipasi dalam menjalankan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di area public yang suka rela.

Sementara itu, dalam frasa yang simpel dan asertif, Westholm et al. (1990) dalam Karim dkk (2015, hlm. 5) menyatakan, bahwa literasi politik pada dasarnya adalah kompetensi warga negara, suatu kompetensi yang dibentuk agar seorang warga negara siap menjalankan perannya dalam kehidupan demokrasi.

Berbasis pemahaman tersebut di atas, literasi politik dengan demikian meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Mudhok (2005) sebagaimana dikutip Karim (2015, hlm. 6) menawarkan setidaknya 4 (empat) elemen literasi politik. Yaitu : (1) kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan, dan perannya; (2) kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik; (3) pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan ublik; (4) partisipasi dalam kegiatan politik.

2. Muatan Pokok Literasi Politik (*Political Literacy*)

a. Partisipasi Politik

Secara mendasar definisi umum dari partisipasi politik adalah sebuah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam sebuah ekosistem politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin Negara secara langsung ataupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut berkaitan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen.

Partisipasi politik dapat dikatakan sebagai seseorang yang ikut serta dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam proses politik berlangsung. Dengan adanya partisipasi politik tersebut secara langsung dapat menumbuhkan *Political Literacy*, karena telah merasakan langsung serta dapat mengidentifikasi fenomena politik tersebut. Dalam menumbuhkan partisipasi politik tersebut secara signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat gurulah yang memiliki peranan dominan untuk menumbuhkan partisipasi politik masyarakat setempat dan para generasi penerus bangsa yang sedang mengenyam pendidikan.

b. Jenis-jenis Partisipasi Politik

Dilihat dari bentuknya, partisipasi politik dibedakan menjadi dua jenis yaitu; pertama partisipasi secara konvensional yang dikenal waktu dan prosedur partisipasinya diketahui oleh public secara pasti, contohnya kampanye dan pemilu. Kedua, partisipasi secara non konvensional yang dikenal tidak pernah mengindahkan etika berpolitik dalam partisipasinya. Contoh aksi anarkisme.

Kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik, tingkatan, kegiatan dan partisipasi politiknya. Berikut ini penjelasannya (**Sastroatmojo**, 1995, hlm. 8-10).

- 1) Dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan, partisipasi militant radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Aktif jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan percaya pada system yang ada. Pasif tertekan jika kepercayaan dan kesadaran politik terhadap system sangat rendah. Militant radikal jika kesadaran politik masyarakat tinggi namun, kepercayaan terhadap kesadaran system politik sangat rendah. Tidak aktif, apabila kesadaran politik masyarakat sangat rendah, namun kepercayaan terhadap system politik sangat tinggi.
- 2) Dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi gladiator, separator dan apatis. Gladiator berarti tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaannya dalam proses politik secara aktif, dan di bagi menjadi enam lapisan partisipasi politik antara lain: pemimpin politik, aktivis politik, komentator politik, warga Negara marginal dan orang yang terisolasi. Separator adalah orang yang setidak-tidaknya menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan apatis adalah tidak peduli atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh.
- 3) Dari sudut pandang kegiatannya, partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Aktif jika dapat mengajukan alternatif kebijakan umum, mengajukan petisi, membayar

pajak dsb. Sedangkan pasif apabila ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan atas hal-hal yang menjadi keputusan pemerintah. Partisipasi aktif berkaitan dengan kegiatan masukan dan keluaran dari suatu system politik, sedangkan partisipasi pasif berkaitan dengan kegiatan atau aspek keluaran dari sistem politik.

- 4) Partisipasi politik dapat pula digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu partisipasi politik dapat digolongkan menjadi partisipasi individu dan partisipasi kolektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Politik

1. Pengertian Politik

Pemikiran mengenai politik (*politics*) di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani abad ke-5 S.M. filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Di dalam *polity* semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi, pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19.

Aristoteles memandang bahwa politik sangat perlu untuk membahas tentang warga Negara sebagai entitas dasar negara-kota. Karena baik atau buruknya suatu polis akan sangat bergantung pada kesepakatan yang seragam demi tercapainya tujuan polis, yakni: kebaikan bersama, maka kesatuan maupun keragaman harus eksis diantara warga Negara (Agustino, 2007, hlm. 5). Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles setidaknya kita mendapatkan beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan apa itu politik. *Pertama*, politik membahas tentang negara yang dalam konteks kelaluan dikenal dengan polis. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal dari suatu negara. *Kedua*, terkait dengan hal yang pertama, maka politik akan sangat pasti bersinggungan dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan kota atau negara terbaik seperti yang dicitakan

Aristoteles dan pemikir filsafat awal, mengenai kebaikan bersama, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak- pihak yang akan mengelola negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem-sistem (khususnya sistem politik) yang dibangun dapat sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. *Ketiga*, merujuk pada penggambaran Aristoteles tentang polis, maka dapat disarikan bahwa politik pun membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Entitas yang tentu saja diinginkan oleh Aristoteles adalah entitas yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan sehingga penciptaan tujuan akan mudah untuk dilakukan (Agustino, 2007, hlm. 6).

Secara terminologis, politik (*politics*) dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, Laswell memberikan pengertian secara klasik (*classic formulation*) tentang politik, yaitu “*politics as who gets what, when and how*”. Miriam Budiardjo mengartikan politik yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengertian yang lebih komprehensif tentang politik dikemukakan Ramlan Surbakti yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Cholisin dan Nasiwan, 2012, hlm. 1).

Miriam Budiardjo (2008, hlm. 14) menjelaskan bahwa dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik dari pada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)”.

Miriam Budiardjo (2008, hlm. 15) juga menjelaskan bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam- macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif seperti urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah di tentukan.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dari alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan, kebijakan hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka.

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materiil maupun yang mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*).

Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaanya, kegiatan politik disamping segi-segi baik juga mencakup segi-segi negatif. Ini disebabkan, karena politik mencerminkan tabiat manusia , baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya sangat mendalam dan sering saling bertentangan mencakup rasa cinta, benci, setia, malu, dan marah. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji atau seperti yang di

rumuskan oleh peter merkl sebagai berikut “Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politic at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*)”. Singkatnya politik adalah perebutan kuasa, takhta, dan harta.

Menurut Hanafie H dan Azmi. S. Ana (2018, hlm.11) Politik dapat ditinjau dari beberapa sudut. Hal ini dapat dilihat dari konsep klasik plato tentang kebaikan bersama, maka politik dapat diartikan sebagai hal-hal yang berurusan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Konsep fungsionalisme berbeda melihatnya. Fungsionalisme melihat bahwa politik dapat diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembuatan dan perumusan keputusan politik. Konsep ini bila dihubungkan dengan konsep klasik kebaikan bersama akan *match*, apabila keputusan-keputusan politik yang dibuat menyangkut kepentingan orang banyak. Persoalan dalam konsep ini yang masih diperdebatkan adalah definisi orang banyak. Kepentingan orang banyak dapat diartikan sebagai interpretasi pemerintah, kelompok tertentu atau memang benar-benar kepentingan public (umum).

Namun demikian, politik disini diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pembuatan dan perumusan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (kepentingan masyarakat umum). Dalam teorinya tentang politik, Andre Heywood menyatakan bahwa politik adalah aktivitas dan politik dengan huruf P besar dinilai sebagai belajar aktivitas “politik”. Politik adalah aktivitas sosial, menunjukkan interaksi orang banyak atau tidak. Pada akhirnya politik adalah tentang keputusan kolektif dan sebaiknya dinilai sebagai sebuah proses dan penyelesaian konflik bukan tujuan.

Dapat di simpulkan bahwasanya politik merupakan sarana untuk mempengaruhi banyak orang untuk membagi dan mendapatkan kekuasaan yang berwujud keputusan/kebijakan, khususnya dalam suatu negara. Dalam politik setiap orang memiliki misi masing-masing untuk diri pribadinya.

2. Terjadinya Pengetahuan Politik

Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan menurut John Hospers dalam bukunya “*An Introduction to Philosophical Analysis*” mengemukakan ada enam hal, yaitu sebagai berikut (Surajiyo, 2010, hlm. 28- 30) :

a. Pengalaman Indra (*Sense Experience*)

Orang sering merasa penginderaan merupakan alat paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Dalam hidup manusia tampaknya penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Aristoteles berpendapat bahwa pengetahuan terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek, artinya bentuk-bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas-bekas dalam kehidupan batin. Objek masuk dalam diri subjek melalui persepsi indra (sensasi).

b. Nalar (*Reason*)

Nalar adalah salah satu corak berfikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah tentang asas-asas pemikiran berikut.

- 1) *Principium Identitas*, asas ini juga biasa disebut asas kesamaan
- 2) *Principium Contradictionis*, asas ini biasa disebut sebagai asas pertentangan
- 3) *Principium Tertii Exclusi*, asas ini biasa disebut sebagai asas tidak adanya kemungkinan ketiga.

c. Otoritas (*authority*)

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Pengetahuan yang terjadi karena adanya otoritas adalah pengetahuan yang terjadi melalui wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan

d. Intuisi (*Intuition*)

Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Peran intuisi sebagai sumber pengetahuan karena intuisi merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang mampu melahirkan pernyataan-pernyataan yang berupa pengetahuan.

e. Wahyu (*Revelation*)

Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-Nya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu, karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan, karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita.

f. Keyakinan (*Faith*)

Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan yang berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas karena keduanya menetapkan bahwa alat lain yang dipergunakannya adalah kepercayaan (Surajiyo, 2010, hlm. 28-30)

D. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

1. Pengertian Guru PPKn

(Sadulloh Uyoh, 2015, hlm. 132) menyatakan Guru merupakan pendidik kedua setelah orang tua yang diberi tugas khusus untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pengganti orang tua di lingkungan sekolah karena hal tersebut sudah menjadi profesi seorang guru.

Menurut Hamzah (2007, hlm. 15) “Guru merupakan orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru ialah yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan”.

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Dengan keilmuan yang dimilikinya, guru membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensinya. (Djamarah, 2002: hlm. 43).

Pada dasarnya beberapa para ahli mengatakan bahwasanya guru adalah seseorang yang mengemban tugas untuk mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didik. Tugas guru sangatlah mulia, karena mereka memiliki tugas yang sangat amat berat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberantas kebodohan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam ayat 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa “Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen”. Mengenai Guru dalam hal ini adalah pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan guru, Pemerintahan mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur tentang guru tersebut yang mana terdapat pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Guru sebagai pendidik harus memenuhi beberapa syarat khusus. Untuk mengajar ia dibekali dengan berbagai ilmu kependidikan dan keguruan sebagai dasar, disertai perangkat latihan keterampilan keguruan (Praktek Pengalaman Lapangan), di situlah ia belajar mempersonalisasikan (menjadi milik pribadi) beberapa sikap keguruan dan kependidikan yang diperlukan. Guru dapat berfungsi sebagai pendidik disamping sebagai pengajar. Guru membentuk sikap siswa, bahwa guru menjadi contoh atau teladan bagi siswa-siswanya. Hal itu tidak mungkin kalau guru hanya bertugas mengajar saja.

Menurut Sadulloh Uyoh (2015, hlm. 132) Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru :

- a. Guru harus sudah memiliki kedewasaan (sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya).
- b. Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan. Dia tidak perlu menganggap dirinya sebagai manusia super, manusia yang tidak pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan.
- c. Guru harus mampu menghayati kehidupan anak, serta bersedia membantunya.
- d. Guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan perkembangan anak didik.
- e. Guru harus mengenal masing-masing anak sebagai pribadi.
- f. Guru harus menjadi seorang pribadi

Ada suatu ungkapan yang menyatakan “Kita tidak dapat mendidik dengan apa yang dimiliki, akan tetapi kita dapat mendidik apa dan siapakah kita ini?”. Maksudnya, betapapun seorang guru itu mengetahui banyak hal (pengetahuan), terampil dalam berbagai hal dan memiliki sikap yang menarik, ia tidak akan dapat mendidik anak dengan baik. Akan tetapi barang siapa yang bisa mengintegrasikan semua itu dalam suatu pribadi yang terpujilah yang dapat berhasil mendidik. Ciri utama pendidik atau guru adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap peserta didik. Pendidik atau guru harus memiliki kewibawaan (kekuasaan batin mendidik) menghindari penggunaan

kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan merupakan suatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian.

Sedangkan guru PPKn merupakan guru mata pelajaran yang memiliki tugas dan peran yang penting dari guru mata pelajaran lainnya. Guru PPKn mempunyai peranan membawa peserta didiknya menjadi manusia yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik. Guru PPKn harus banyak berusaha agar peserta didiknya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PPKn dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta dorongan ke arah yang lebih baik. (Sumantri, 1976: hlm 35).

Guru yang baik adalah yang selain bisa memberikan teori atau materi pelajaran saja, akan tetapi guru juga bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. tidak dapat dipungkiri bahwa guru selain mengajar juga sebagai panutan dari peserta didik dalam berperilaku khususnya di lingkungan sekolah. (Amirullah Syarbini, 2014: hlm 106). Oleh karena itulah guru PPKn disini sangatlah berperan penting dari guru mata pelajaran lainnya, khususnya dapat menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik di sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Guru PPKn ialah guru yang memiliki peranan yang sangat sentral dalam merekonstruksi cara berpikir peserta didik untuk tetap memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam serta memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, guru PPKn bertanggung jawab atas perilaku peserta didik. Guru PPKn harus memiliki pengetahuan di berbagai disiplin ilmu juga wajib mencontohkan perilaku-perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma syara yang berlaku. Begitu berat tugas dari seorang Guru PPKn selain mengubah mindset berpikir calon generasi penerus bangsa juga memiliki tanggung jawab untuk merubah moral peserta didiknya agar tidak berbenturan dengan norma yang berlaku di negara Indonesia.

Pendidik atau guru hanya menjadi pendidik dalam hubungannya dengan anak didik dan sebagai perannya dalam situasi pendidikan dan juga begitupun sebaliknya tentang anak didik (terdidik). Tiada pendidik tanpa anak didik dan begitu saja sebaliknya tiada anak didik tanpa pendidik. Dalam dunia bersama, pihak pendidik menjadi penjelmaan dari kedewasaan bagi kepentingan anak. Tanpa orang dewasa sebagai pendidik maka faktor kedewasaan merupakan tujuan umum yang berada diluar situasi pendidikan (Prof. Wasyidin W, 2016, hlm. 107).

Prof Wasyidin W (2016, hlm. 107) mengatakan pula atas dasar tujuan pokok yang berada di luar pendidikan maka dikatakan bahwa pendidik ialah orang dewaa dalam situasi pendidikan dengan anak didik dan tiada dalam situasi pergaulan, situasi alam sekitar ataupun dalam masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, secara ilmu pedagogic megenal tiga jenis pendidik atau guru, yaitu 1) pendidik *sewajarnya*, berhubung dengan fungsi sebagai orang tua yang wajar. 2) pendidik *pengganti* dil lembaga pendidikan karena penyerahan tanggung jawab oleh orang tua. 3) Pendidik *karena Tuhan*, khusus pada pendidik pengganti, tidak sendirinya pendidik mencapai kewibawaan mengingat keterbatasan (segi ketidakberdayaan) pendidik itu.

Dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki keahlian dalam bidangnya yakni mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik dalam menyongsong kehidupannya di masa yang akan datang, sedangkan guru PPKn merupakan tenaga pendidik professional yang mengajar , mendidik, dan melatih di bidang PPKn agar peserta didik memiliki wawasan kebangsaan yang baik serta memiliki moral sesuai dengan norma yang berlaku. Paket sangat lengkap terkait tugas yang diemban oleh guru PPKn karena PPKn pada dasarnya membahas materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi ketika pembahasan pendidikan politik guru PPKn harus menjadi aktor utama dalam mengejawantahkan ilmu politik yang etis bukan politik praktis.

2. Peran Guru PPKn

Guru PPKn memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lainnya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk membentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan peran guru PPKn bukan hanya menstransfer ilmu pengetahuan aja akan tetapi harus juga menstransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Peran guru PPKn dalam membina dan membimbing peserta didik untuk memiliki moral dan perilaku yang baik dapat dilakukan didalam maupun diluar kelas, akan tetapi waktu yang tepat dilakukannya ialah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga guru PPKn menjadi aktor politik utama kepada peserta didik, supaya peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisa fenomena politik yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah seyogyanya guru PPKn patut memiliki pengetahuan politik yang tinggi, karena jangan sampai guru mengajarkan sebuah politik yang tidak benar kepada peserta didik hanya karena pandangan subjektifitasnya kepada politik. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari politik, ketika kita lahir ke dunia kita sudah berpolitik karena dasar politik adalah mempengaruhi. Politik bukan barang haram untuk di jauhi oleh semua orang sudah sepantasnya semua orang memiliki wawasan yang luas untuk berpolitik (*political literacy*).

Guru PPKn dapat menyusun pengajaran mulai dari materi, penggunaan metode, media, sumber pengajaran dan evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn yaitu aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, guru PPKn memiliki tanggung jawab untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik. Menurut Djahiri Kosasih (1999, hlm 19) tentang peran guru PPKn yaitu:

- a. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa pancasila dan berkepribadian Indonesia.

- b. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek konstitusi atau hukum, melek pembangunan, dan melek permasalahan diri, masyarakat dan negara.
- c. Membina pembekalan peserta didik (substansional dan potensi dirinya untuk belajar lebih lanjut).

Sehubungan dengan peran guru PPKn diatas maka seorang guru PPKn dituntut harus bisa membentuk pelajar yang memiliki kepribadian yang baik, melek politik, selain itu juga harus membentuk pelajar yang melek hukum dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta bekal dengan ilmu pengetahuan yang bisa dijadikannya sebagai bekal untuk menjalani hidup dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam peran guru PPKn sangatlah krusial untuk membangun peserta didik memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan sehingga tujuan PPKn yaitu menjadikan warga negara yang baik tercapai. Oleh karena itu, peran guru PPKn sangatlah penting bagi perkembangan sikap dan perilaku bagi peserta didik baik dalam kelas maupun di luar kelas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru PPKn pun harus memiliki pengetahuan yang amat luas dan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu agar tak membuat peserta didik jadi salah arah. Guru yang tidak memiliki pengetahuan akan melahirkan suatu konsepsi rantai makanan, yakni bodoh satu, bodoh dua, bodoh tiga, bodoh selamanya,

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rohmawati dalam **skripsi-nya** berjudul “Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis Di Sma Negeri Se Kabupaten Bantul”. Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut :
 - a. Pemahaman guru PKn tentang pendidikan politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang PKn sebagai pendidikan politik karena pada dasarnya PKn sebagai pendidikan

politik itu merupakan sarana pendidikan politik yang dilakukan secara formal di sekolah yang diusahakan secara terencana, sistematis, dan terprogram. Selain itu, guru PKn perlu memahami tentang konsep, tujuan, substansi PKn karena PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu misi PKn sebagaimana tercermin dalam konsep, tujuan, dan substansi PKn, yang mana ingin membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara serta diharapkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Mengamati tingkat pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi pada masing-masing indikator, ternyata hampir di setiap indikator masih ada guru PKn yang memiliki pemahaman yang sangat rendah, yakni 1 guru (2,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang konsep budaya politik, 24 guru (55,8%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang komponen-komponen budaya politik, 4 guru (9,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang tipe-tipe budaya politik, 1 guru (2,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang prinsip dan elemen budaya demokrasi, nilai-nilai budaya demokrasi, serta sikap dan perilaku politik demokrasi. Sementara untuk indikator memahami konsep budaya demokrasi semua guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi.
- c. Hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu 18 guru (41,9%) termasuk dalam kategori sedang, 14 guru (32,6%) termasuk dalam kategori tinggi, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori rendah, dan 4 guru (9,3%) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori sedang.
- d. Sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul belum optimal dalam mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif dengan

mengkaitkan dengan perkembangan politik di Indonesia, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, mengolah kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analisis, dan menyenangkan bagi peserta didik, memilih metode pembelajaran yang partisipasif dan dapat menumbuhkan nilai politik demokratis, serta di dalam memilih sumber belajar yang dapat memberikan latihan kewarganegaraan. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun masih banyak yang belum berorientasi pada penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan secara seimbang. Apabila ditinjau dari pendidikan politik yang melekat politik, maka pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dapat dikatakan belum cukup berhasil dalam rangka mewujudkan peserta didik untuk memiliki kesadaran politik karena untuk menjadikan warga negara yang memiliki kesadaran politik diperlukan pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik memiliki pandangan yang komprehensif, berpikir kritis, dan mampu mengambil solusi terhadap persoalan-persoalan publik.

- e. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya diperoleh gambaran tentang implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik, yaitu 35 guru (81,4%) termasuk dalam kategori sedang, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori rendah, dan 1 guru (2,3%) termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori sedang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Hamisa dalam **Jurnal Penelitian** dengan Judul “Peran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis Dan Partisipasi Siswa Dalam Organisasi Di SMA”. Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, merupakan upaya khusus dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Oleh karena itu, peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya pelajar sebagai generasi penerus yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guru berusaha membangun sikap siswa dengan menyisipkan hal-hal yang dapat membangun sikap siswa, siswa diberi motivasi, dan dipahamkan akan pentingnya membangun sikap demokratis. Pendidikan politik yang siswa dapatkan di sekolah tentunya melalui kegiatan sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua organisasi dan kegiatan lain yang mengajarkan siswa untuk aktif, kritis, berpikir maju, memahami akan pentingnya tanggung jawab dan mengerti akan hak dan kewajibannya.
- b. Sikap demokratis dan partisipasi siswa yang berusaha dibangun dalam organisasi kesiswaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ternyata mengalami hambatan yang dirasa sangat penting. Hambatan ini ditemui dalam beberapa faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar ikut ambil andil dalam hambatan untuk membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, sebab lingkungan sekitar juga menentukan sikap dan perilaku siswa itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan siswa lebih banyak berada di luar sekolah. Sejalan dengan pernyataan Walgito, (2002, hlm. 55-56) tentang pembentukan sikap seseorang, yaitu karena adanya: Faktor individu itu sendiri atau faktor dari dalam, yang dimaksud faktor dari dalam adalah bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja akan diterimanya tetapi individu mengadakan seleksi mana yang akan

diterima dan mana yang ditolak. Faktor luar atau ekstern yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan rangsangan atau stimulus atau yang mengubah sikap.

- c. Upaya untuk mengatasi hambatan membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan dapat diatasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dengan meningkatkan kinerja guru, baik melalui mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran dan memotivasi siswa itu sendiri. Sikap demokratis dan partisipasi siswa dapat dibangun agar dapat mengembangkan kreativitas peserta didik untuk melakukan kajian-kajian berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diintegrasikan kepada masing-masing individu sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak yang berpijak pada pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah-sekolah.

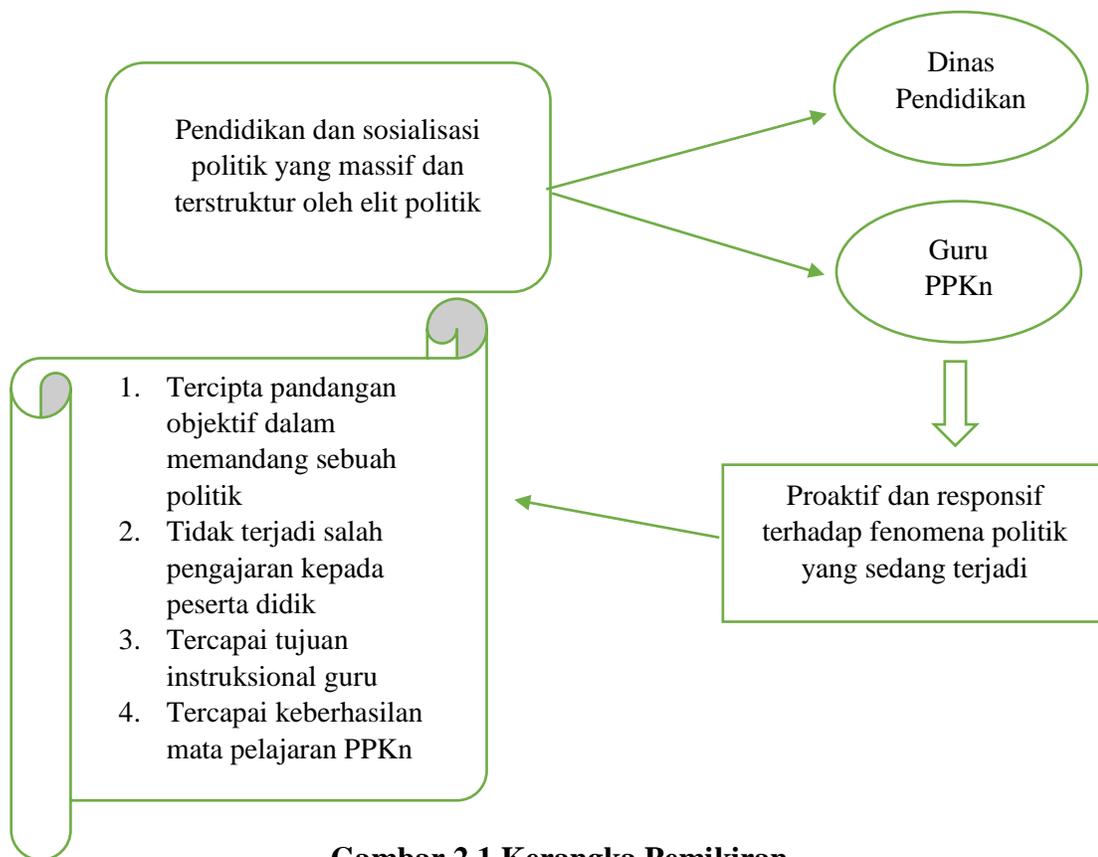
F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kajian Teori yang sudah dijelaskan diatas, Maka dapat dirumuskan Penelitian ini kedalam Beberapa Kerangka Pemikiran yang terdiri dari :

1. Adanya sebuah problematika yang cukup mendasar mengenai pendidikan politik sendiri kepada guru PPKn dan *stakeholder* Dinas Pendidikan daerah tersebut. Guru PPKn yang merupakan aktor utama pendidikan politik dari peserta didik seyogyanya memiliki jangkauan pengetahuan yang luas mengenai politik, karena PPKn merupakan pendidikan politik di sekolah. Penelitian ini akan membahas tentang persepektif politik dalam kacamata guru PPKn serta analisis guru PPKn terkait fenomena politik yang terjadi (*political literacy*) di era disrupsi ini. Penelitian ini berusaha memberi gambaran serta penjabaran arti data-data yang terkumpul dengan memerhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek yang diteliti dengan menggunakan metode observasi (pengamatan), wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang dimaksud adalah

bagaimana para politisi memberikan pendidikan politik kepada Guru PPKn dan Dinas Pendidikan setempat supaya tenaga pendidik di Indonesia khususnya bidang PPKn tidak salah arah dalam memandang sebuah politik itu sendiri.

2. Adanya sebuah permasalahan yang cukup besar dari guru PPKn itu sendiri, permasalahan tersebut meliputi : (1) Guru PPKn tidak responsif terhadap fenomena politik yang terjadi, sehingga hal tersebut akan membuat peserta didik kurang literasi dalam mengartikan sebuah politik. (2) Guru PPKn kerap kali menyampaikan sebuah pendidikan politik dengan pandangan yang subjektif kepada peserta didik sehingga peserta didik tidak dapat membuka pikiran ketika melihat fenomena politik yang terjadi.
3. Tidak adanya sebuah partisipasi yang begitu antusias dari kalangan pemuda dan pemudi dalam menggunakan hak politiknya, karena mereka sering diberikan sebuah asumsi yang tidak sesuai dengan data dan fakta oleh guru PPKn ketika di sekolah. Mereka terdoktrin oleh sebuah asumsi tersebut, sehingga menutup pikirannya untuk proaktif terhadap politik. Sebuah pepatah mengatakan “guru kencing berdiri, siswa kencing berlarian” itu sebuah sematan yang pas untuk kerangka pemikiran peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Peneliti

G. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Penelitian

Ada beberapa asumsi yang dikembangkan dari Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Asumsi penelitian mengenai pendidikan politik sendiri, melihat dari bahwa Pendidikan politik dirujuk sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam, serta pendidikan politik merupakan bentuk pendewasaan manusia dalam mengambil keputusan. Secara eksplisit berdasarkan pengertian tersebut pendidikan politik dapat menekankan pandangan objektif seorang guru PPKn terhadap suguhan dinamika politik yang terjadi, sehingga guru PPKn nanti ketika proses pembelajaran tidak asal memberikan suatu pemahaman politik

kepada peserta didik dan efek kedepannya jika dibiarkan secara terus menerus akan mengakibatkan semua orang khususnya generasi muda salah tafsir ketika melihat konstelasi politik.

- b. Ketika pendidikan politik berangsur secara terus menerus diberikan kepada guru PPKn dengan metode dan analisis yang benar, maka dapat memperkaya wawasan guru PPKn ketika melihat sebuah fenomena politik yang terjadi. Dengan guru PPKn memiliki wawasan yang mumpuni dampaknya akan menciptakan generasi penerus yang mampu mengubah wajah Indonesia dalam bidang politik.
- c. Apabila canangan pendidikan politik yang diusung oleh partai politik sesuai dengan ekpektasi, maka tenaga pendidik akan terhindar dari sebuah tafsiran palsu dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Partai politik wajib menyusun pendidikan politik yang berkualitas agar tercipta tenaga pendidik khususnya guru PPKn yang memiliki mutu yang sangat tinggi dalam menafsirkan secara detail kehidupan politik.
- d. Melalui upaya pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada guru PPKn secara *step by step*, seharusnya guru PPKn mendapatkan pendidikan politik berkualitas tidak hanya dari pemerintah dan partai politik saja , melainkan dari dinas pendidikan pula. Maka dari itu pemerintah secara intens wajib memberikan pendidikan politik pula kepada seluruh *stakeholder* dinas pendidikan, agar dinas pendidikan tidak menutup mata dalam merealisasikan sebuah tanggung jawabnya sebagai wakil pusat di daerah.

2. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan Penelitian yang sudah di kemukakan di atas, maka selain akan mencoba menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan, dalam penelitian ini di rumuskan Hipotesis yang akan diuji berdasarkan hasil dan data penelitian, Hipotesis berkaitan dengan pertanyaan tentang subjektifitas dan kurangnya pemahaman seorang guru PPKn dalam memahami sebuah dinamika politik serta pertanyaan mengenai upaya pendidikan politik dari

pemerintah dan partai politik yang berkualitas kepada tenaga pendidik di Indonesia, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- a. Jika seorang guru PPKn paham secara komprehensif mengenai dinamika politik yang terjadi serta objektifitas pandangan politiknya masih terukur, maka tidak akan lagi kejadian salah tafsir oleh generasi penerus bangsa Indonesia yang bersumber dari guru PPKn.
- b. Pendidikan politik secara terstruktur dan sistematis harus di berikan kepada seorang guru PPKn, karena guru PPKn merupakan aktor utama di sekolah dalam memberikan pendidikan politik. Jikalau pendidikan dan sosialisasi politik secara konsisten diberikan kepada guru PPKn, maka guru PPKn akan responsif terhadap fenomena politik yang terjadi dan memiliki pengetahuan yang amat luas terhadap sebuah dinamika politik.
- c. Pendidikan politik dengan kualitas tinggi tetap harus diberikan kepada seorang tenaga pendidik khususnya guru PPKn, karena guru PPKn kedepanya akan menciptakan generasi muda yang haus akan pengetahuan. Jikalau pendidikan politik yang kualitasnya tinggi maka akan tercipta pula guru PPKn yang memiliki kualitas tinggi sesuai dengan harapan.
- d. Jikalau pendidikan politik secara step by step terlaksana sebagaimana mestinya, ini akan menciptakan sebuah konsepsi yang amat baik. Pendidikan politik perlu juga diberikan kepada dinas pendidikan, karena dinas pendidikan bertugas mengurus masalah pendidikan di setiap daerah. Dengan dinas pendidikan yang melek politik, maka setiap guru pun memiliki sikap melek politik pula, karena setiap permasalahanya sudah ditambal dengan baik. Jikalau ini berlanjut secara terus menerus maka pendidikan politik di Indonesia sangat berhasil.